



CONSTRUCTION & INVESTMENT

Empowering The Future

KEPUTUSAN ATASAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PT PP (PERSERO) TBK

Tentang

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. Komitmen Perseroan untuk menyediakan layanan informasi publik yang transparan dan berkualitas;
b. Terdapat beberapa dokumen atau informasi milik Perseroan yang tidak dapat terbuka secara keseluruhan ke publik;
c. Sehubungan dengan kebutuhan publik atas informasi atau dokumen Perseroan melalui permohonan informasi publik yang harus di kelola dengan baik melalui pembentukan kebijakan;
d. Bawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Perseroan menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2024
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
d. Pedoman Good Corporate Governance PT PP (Persero) Tbk.
e. Lembar Pengujian Konsekuensi atas Daftar Informasi Publik Tahun 2024 tanggal 3 Februari 2025

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
- Kesatu : Daftar Informasi Dikecualikan pada Lampiran 1 telah ditentukan melalui mekanisme Uji Konsekuensi



Empowering The Future

CONSTRUCTION & INVESTMENT

- Kedua : Mencabut seluruh ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Februari 2025
PT PP (Persero) Tbk



JOKO RAHARJO
Atasan PPID PT PP (Persero) Tbk

Menetapkan : DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

Lampiran 1

Lembar Uji Konsekuensi atas Informasi Dikecualikan

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI PUBLIK
PT PP (PERSERO) TBK
PERIODE TAHUN 2025

Pada tanggal 3 Februari 2025, bertempat di Auditorium Wisma Subiyanto PT PP (Persero) Tbk, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dinyatakan sebagai Informasi Dikecualikan baik yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka, maupun Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
Pengadaan Barang dan Jasa					
1	Nilai Kontrak pada Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Owner, Vendor, maupun Rekanan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan	- Melanggar kesepakatan kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam klausul Kontrak dengan Pemberi Kerja - Mengganggu stabilitas persaingan usaha yang sehat	- Menjaga kerahasiaan informasi antara PTPP dengan Klien - Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
	Persaingan Usaha Tidak Sehat				
2	<i>Memorandum of Understanding</i> (Nota Kesepahaman) yang bersifat strategis	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	Melanggar kesepakatan kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam klausul MOU dengan Klien	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kerahasiaan informasi antara PTPP dengan Klien - Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi 	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
3	Transaksi Keuangan baik dengan Pengguna Jasa maupun dengan Vendor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
4	Longlist dan Shortlist Daftar Tender yang akan diikuti	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab - Mengganggu stabilitas persaingan usaha yang sehat 	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Terbatas (dapat diakses oleh para peserta undangan tender, pihak lain yang memiliki kewenangan mendapatkan informasi untuk keperluan semisal audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
5	Resume data transaksi (SAP dan non SAP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	Dokumen merupakan dokumen rahasia PTPP yang mengandung informasi transaksi bisnis PTPP	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga keseimbangan persaingan usaha yang sehat mengingat strategi perusahaan tidak diketahui oleh publik termasuk kompetitor. - Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi. 	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
6	Dokumen Penawaran Tender, Real Cost dan Analisa Harga	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	Membuka informasi tersebut ke publik dapat membahayakan kepentingan komersial dan keunggulan kompetitif.	Menjaga keseimbangan persaingan usaha yang sehat mengingat strategi perusahaan tidak diketahui oleh publik termasuk kompetitor.	Terbatas (dapat diakses oleh para peserta undangan tender, pihak lain yang memiliki kewenangan mendapatkan informasi untuk keperluan semisal audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
7	Dokumen Finalisasi Serah Terima Proyek dari Dept. Tender ke Dept. Operasi: - RAPT - RAPK HP 0-10%	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	Merupakan dokumen rahasia PTPP yang mengandung informasi transaksi bisnis PTPP	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga keseimbangan persaingan usaha yang sehat mengingat strategi perusahaan tidak diketahui 	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
	- RAPK HP 30-50% - RAPK HP 70-90% - RAPK HP 100%"			oleh publik termasuk competitor - Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
8	Materi Hold Point (0-10%, 30-50%, 70-90% dan 100%) dan Materi FGD Pembahasan Proyek	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	Merupakan dokumen rahasia PTTP yang mengandung informasi transaksi bisnis PTTP	- Menjaga keseimbangan persaingan usaha yang sehat mengingat strategi perusahaan tidak diketahui oleh publik termasuk competitor - Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
9	Dokumen Tutup Buku: 1. As Built Drawing 2. Dokumentasi Proyek 3. Hasil Testing 4. Daftar Usulan Pemeliharaan 5. Manual Book Pekerjaan 6. Dokumen Administrasi & Keuangan 7. Defect List	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	Merupakan dokumen rahasia PTTP yang mengandung informasi transaksi bisnis PTTP	- Menjaga keseimbangan persaingan usaha yang sehat mengingat strategi perusahaan tidak diketahui oleh publik termasuk competitor - Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
	8. Adendum Final 9. BAST 1 dan BAST 2 10. Project Planning Final (RKP) 11. Buku Karya Konstruksi 12. BA HP 100%				
10	Monitoring Pemasaran Pekanan, Bulanan & Tahunan Internal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	Merupakan dokumen rahasia PTPP yang mengandung informasi transaksi bisnis PTPP	- Perolehan Kontrak Baru dapat dikendalikan, berdasarkan Target Kontrak Baru Eksternal. - Persaingan Perolehan Kontrak Baru BUMN Karya semakin kompetitif.	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
11	User Password LPSE Kementerian, VMS (BUMN), OSS, ESDM, SIKI LPJK, SIMPAN, dan akun Sertifikat SKK Personil	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	Kompetitor dapat mengetahui kekuatan & kelemahan perusahaan dalam kelengkapan Dokumen Persyaratan Tender yang dapat mengganggu stabilitas persaingan usaha yang sehat	Merupakan kekuatan perusahaan untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti & memenangkan tender suatu proyek. Dokumen Perusahaan kebutuhan persyaratan tender hanya konsumsi internal tim tender perusahaan.	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
12	Kajian Risiko (<i>Risk Register</i>) Tender	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	Identifikasi risiko, Risk Inheren, Strategi penanganan risiko dan <i>Risk Residual</i> (<i>Risk Contingency</i>) diketahui oleh pesaing menyebabkan terhambatnya ketercapaian target tender.	- Menjaga kerahasiaan strategi pemenangan tender dan - Mencegah penyalahgunaan data risiko oleh kompetitor	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
13	Kajian Risiko (<i>Risk Register</i>) Proyek	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	Memberikan informasi strategis yang dimanfaatkan oleh pesaing untuk mendapatkan keunggulan kompetitif pada proyek sejenis.	Menjaga kerahasiaan strategi proyek dalam menangani risiko untuk mencapai keberhasilan proyek, dan mencegah penyalahgunaan data risiko oleh kompetitor.	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
Manajemen Risiko dan Aksi Korporasi					
14	Dokumen Kajian Legal Persetujuan Divestasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	Terdapat pertimbangan atau isu-isu yang bersifat rahasia di PTTP	- Menjaga kerahasiaan informasi di PTTP dan mitra - Menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
15	Dokumen Kajian Legal Persetujuan Hutang ke AP/Afiliasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Terdapat pertimbangan dan isu-isu yang bersifat internal di PTTP	- Menjaga kerahasiaan antar pemberi dan penerima Hutang karena bersifat	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j		strategi dan kondisi keuangan masing-masing entitas - Mencegah penyalahgunaan data dan informasi yang ada bagi kedua belah pihak	pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
16	Dokumen Kajian Legal Persetujuan Akuisisi/Merger	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	Terdapat strategi, tinjauan komprehensif, sebagai pertimbangan keputusan di PTTP	- Menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi - Menjaga strategi perusahaan dalam pengambilan keputusan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
17	Dokumen Kajian Legal Penerbitan Hutang baru / Right Issue	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	- Terdapat strategi, independensi dan tinjauan komprehensif yang bersifat rahasia - Dapat terjadi penyalahgunaan informasi	- Melindungi strategi perusahaan - Mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
18	Kajian Risiko Aksi Korporasi (Investasi, Divestasi, Instrument Keuangan dll)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	Strategi penanganan risiko termasuk sebagai pertimbangan penentuan harga (total capex investasi, nilai penawaran divestasi), diketahui	- Menjaga kerahasiaan strategi pemenangan tender - Mencegah penyalahgunaan data risiko oleh kompetitor	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
			<p>kompetitor atau calon pembeli, sehingga :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat persaingan tidak sehat dengan kompetitor untuk tender - Gagal dalam proses tender - Untuk divestasi, calon pembeli tidak berminat 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kerahasiaan keberhasilan divestasi 	
19	Kajian Risiko Aksi Korporasi Subsidiary	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	<p>Strategi penanganan risiko termasuk sebagai pertimbangan penentuan harga (total capex investasi, nilai penawaran divestasi), diketahui kompetitor atau calon pembeli, sehingga :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat persaingan tidak sehat dengan kompetitor untuk tender - Menghambat ketercapaian atas target tender dan target divestasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kerahasiaan strategi pemenangan tender - Mencegah penyalahgunaan data risiko oleh kompetitor - Menjaga kerahasiaan keberhasilan divestasi 	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
Keuangan					
20	Kertas Kerja Akuntansi yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Worksheet Laporan Keuangan Konsolidasi 2. Worksheet Perhitungan CKPN/Impairment 3. Aging Utang dan Piutang 4. Rekap Data Intercompany 5. Perhitungan Amortisasi Obligasi & Sukuk 6. Perhitungan Utang dan Piutang Bunga 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	<ul style="list-style-type: none"> - Kebocoran informasi internal perusahaan yang bersifat rahasia terkait treatment/kebijakan akuntansi manajemen - Penyalagunaan data informasi akuntansi 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi informasi terkait kebijakan manajemen yang bersifat rahasia - Mencegah penyalahgunaan data informasi akuntansi untuk hal-hal yang merugikan perusahaan 	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
21	Laporan Analisis Keuangan dan Akuntansi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kertas kerja Analisa Laporan dan Rasio Keuangan 2. Kertas kerja Neraca RKAP 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	Data rahasia keuangan perusahaan dapat disalahgunakan	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi informasi yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan perusahaan - Melindungi informasi yang terkait dengan penyusunan RKAP perusahaan 	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
22	Dokumen Akuntansi: 1. PF Bulanan (Kinerja Manajerial Bulanan) 2. Detail Penjelasan Pendapatan Dan Beban Lain-lain (Rupa-rupa) 3. Monitoring BDD (Biaya Dibayar Dimuka) 4. Monitoring RKAP dan Realisasi Biaya Usaha	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	- PF Bulanan : Terdapat detail kinerja perusahaan yang tidak dapat dibuka ke publik - Memungkinkan untuk disalahgunakan karena terdapat beberapa informasi sensitif terkait detail akun Biaya Usaha, Biaya dibayar Dimuka, Pendapatan dan Biaya lain-lain	- Melindungi perusahaan dari pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan informasi tersebut. - Mencegah kebocoran data RKAP dan Realisasi Biaya usaha	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
23	Data Bukti Potong Karyawan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	Melanggar perlindungan atas data pribadi yang bersifat <i>confidential</i>	Mencegah penyalahgunaan data pribadi yang bersifat <i>confidential</i>	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
24	Dokumen Verifikasi: 1. Post Invoice SKBDN 2. Post Invoice Biaya Usaha	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	- Penyalahgunaan Data Informasi Kontrak SKBDN - Kebocoran data biaya usaha unit/divisi yang sifatnya rahasia	- Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi terkait SKBDN - Melindungi kerahasiaan informasi biaya usaha unit/divisi	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
25	Prospektus dalam rangka Penerbitan Umum Berkelanjutan Obligasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	Melanggar aturan OJK karena belum memperoleh izin publikasi prospektus ke publik.	Mematuhi aturan OJK dan terhindar dari sanksi	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
Kepegawaian					
26	Data pelatihan dan sertifikasi yang diikuti pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	- Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat, karena dapat diakses oleh kompetitor - Kompetitor dapat menduplikasi ide atau gagasan dari pelaksanaan tata kelola organisasi perusahaan	- Informasi berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat - Mencegah duplikasi ide atau gagasan perusahaan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
27	Identitas data diri (No.KTP, alamat KTP, Domisili, No Telp, Contoh Spesimen TTD dan lainnya dari pegawai status PKWT dan PKWTT atau lainnya yang bekerja di PT PP (Persero) Tbk	1. Undang-Undang No.27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	- Dapat mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi pegawai disalahgunakan untuk kejahatan keuangan, pemerasan, penipuan, pengajuan pinjaman tanpa sepengetahuan pegawai dan kejahatan lainnya	Melindungi informasi yang berkaitan dengan hak pribadi pegawai	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
		Informasi Publik huruf b, i dan j	- Melanggar perlindungan data pribadi yang diatur oleh Undang-Undang		
28	Data remunerasi pegawai (gaji pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap serta besaran kompensasi pemutusan hubungan kerja)	1. Undang-Undang No.27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	Melanggar perlindungan atas data pribadi yang bersifat <i>confidential</i>	Mencegah penyalahgunaan data pribadi yang bersifat <i>confidential</i>	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
29	Data struktur skala gaji pegawai	1. Undang-Undang No.27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Melanggar perlindungan atas data pribadi yang bersifat <i>confidential</i>	Mencegah penyalahgunaan data pribadi yang bersifat <i>confidential</i>	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
		Informasi Publik huruf b, i dan j			
30	Dokumen penanganan kasus pelanggaran pegawai	1. Undang-Undang No.27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	Melanggar perlindungan atas data pribadi yang bersifat <i>confidential</i>	Mencegah penyalahgunaan data pribadi yang bersifat <i>confidential</i>	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
31	Dokumen keluhan pegawai	1. Undang-Undang No.27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	Melanggar perlindungan atas data pribadi yang bersifat <i>confidential</i>	Mencegah penyalahgunaan data pribadi yang bersifat <i>confidential</i>	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
32	Data riwayat kesehatan pegawai	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pasal 2 huruf c	Bertentangan dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan	Menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data Riwayat Kesehatan pegawai	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
33	Perjanjian Kerja (PKWT, PKWTT seluruh level)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi pegawai - Melanggar perlindungan data pribadi yang diatur oleh Undang-Undang 	Melindungi informasi yang berkaitan dengan hak pribadi pegawai	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
34	Surat keputusan direksi mengenai kebijakan pengelolaan SDM termasuk namun tidak terbatas dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Direksi tentang Kompensasi Pegawai PHK dan Pensiun 2. SK Direksi tentang Pengelolaan Kesehatan Pegawai 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat, karena dapat diakses oleh kompetitor - Kompetitor menduplikasi ide atau gagasan dari pelaksana tata kelola organisasi perusahaan - Data internal HC perusahaan, Penyalahgunaan informasi operasional perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat - Mencegah duplikasi ide atau gagasan perusahaan 	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
	3. SK Direksi tentang Penerapan Remunerasi Pegawai 4. SK Direksi tentang Insentif Pegawai 5. SK Direksi tentang Penetapan Remunerasi Direktur Anak Perusahaan 6. SK Direksi tentang Penetapan Insentif Pegawai 7. SK Direksi tentang Perubahan Struktur Grading dan Jabatan 8. SK Direksi tentang Struktur Organisasi Perusahaan 9. SK Direksi lainnya				
35	Data evaluasi kinerja individu pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	- Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat, karena dapat diakses oleh kompetitor	- Informasi berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
			<ul style="list-style-type: none"> - Kompetitor menduplikasi ide atau gagasan dari pelaksanaan tata kelola organisasi perusahaan - Membuat demotivasi pegawai yang mendapatkan evaluasi kinerja dengan nilai di bawah standar 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah duplikasi ide atau gagasan perusahaan - Tidak membuat demotivasi pegawai yang mendapatkan penilaian buruk pada evaluasi kinerja - Mendukung pengembangan pegawai, menghindari konflik antar pegawai 	terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
36	Data evaluasi kinerja unit divisi dan anak usaha	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat, karena dapat diakses oleh kompetitor - Kompetitor menduplikasi ide atau gagasan dari pelaksanaan tata kelola organisasi perusahaan - Membuat demotivasi pegawai yang mendapatkan evaluasi kinerja unit dengan nilai di bawah standar 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat - Mencegah duplikasi ide atau gagasan perusahaan - Tidak membuat demotivasi pegawai yang mendapatkan penilaian buruk pada evaluasi kinerja - Mendukung pengembangan pegawai serta menghindari konflik antar pegawai 	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
37	Data Manpower Plan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat, karena dapat diakses oleh kompetitor - Kompetitor menduplikasi ide atau gagasan dari pelaksanaan tata kelola organisasi perusahaan - Potensi kehilangan talent dan menimbulkan ketidakstabilan kondisi internal antar pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat - Mencegah duplikasi ide atau gagasan perusahaan - Mencegah <i>hijack talent</i> dan menimbulkan ketidakstabilan kondisi internal antar pegawai 	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
38	Data <i>talent</i> pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat, karena dapat diakses oleh kompetitor - Kompetitor menduplikasi ide atau gagasan dari pelaksanaan tata kelola organisasi perusahaan - Potensi kehilangan talent dan menimbulkan ketidakstabilan kondisi internal antar pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat - Mencegah duplikasi ide atau gagasan perusahaan - Mencegah <i>hijack talent</i> dan menimbulkan ketidakstabilan kondisi internal antar pegawai 	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
39	Data calon pegawai (pelamar) dan hasil seleksi penerimaan pegawai	1. Undang-Undang No.27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi pegawai - Melanggar perlindungan data pribadi yang diatur oleh Undang-Undang 	Melindungi informasi yang berkaitan dengan hak pribadi pelamar dan pegawai	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
40	Dokumen Perjanjian Ikatan Dinas	1. Undang-Undang No.27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi pegawai - Melanggar perlindungan data pribadi yang diatur oleh Undang-Undang 	Melindungi informasi yang berkaitan dengan hak pribadi pegawai	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
Hukum					
41	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, pendapat hukum, catatan mengenai penyelesaian permasalahan/sengketa yang masih dalam proses	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a	Apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dan pihak lain yang terkait - Memperlancar proses penegakan hukum 	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
Dokumen Internal Badan Publik					
42	Risalah Rapat Direksi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Kebocoran data internal perusahaan - Penyalahgunaan informasi operasional perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga keseimbangan persaingan usaha yang sehat mengingat strategi perusahaan tidak diketahui oleh publik termasuk kompetitor - Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi 	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
43	Lembar Disposisi, memo, nota, dinas dan surat menyurat lainnya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Kebocoran data internal perusahaan - Penyalahgunaan informasi operasional perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga keseimbangan persaingan usaha yang sehat mengingat strategi perusahaan tidak diketahui oleh publik termasuk kompetitor - Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi 	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
Keterbukaan Informasi Publik berkaitan dengan PPID					
44	Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan informasi oleh publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi informasi yang tersedia dari pihak yang tidak berkepentingan 	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
45	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan informasi oleh publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi informasi yang tersedia dari pihak yang tidak berkepentingan 	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
	yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana				terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
46	Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan informasi oleh publik - Terdapat beberapa surat menyurat milik Perusahaan yang bersifat internal dan tertutup yang tidak dapat diketahui publik dengan tujuan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi informasi yang tersedia dari pihak yang tidak berkepentingan 	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
47	Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan informasi oleh publik - Terdapat beberapa surat menyurat milik Perusahaan yang bersifat internal dan tertutup yang tidak dapat diketahui publik dengan tujuan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi informasi yang tersedia dari pihak yang tidak berkepentingan 	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
48	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan informasi oleh publik - Terdapat beberapa surat menyurat milik Perusahaan yang bersifat internal dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi informasi yang tersedia dari pihak yang tidak berkepentingan 	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
	Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi		tertutup yang tidak dapat diketahui publik dengan tujuan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan		terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
49	Menyediakan anggaran rutin baik yang bersifat pengembangan keterampilan PPID dan kegiatan keterbukaan Informasi lain	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Kebocoran informasi internal perusahaan yang bersifat rahasia terkait treatment/kebijakan keuangan internal perusahaan	- Tidak terdapat dampak negatif apabila informasi ini ditutup	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dan terpercaya)
50	Dokumen jawaban PPID atas permohonan informasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Publik tidak mengajukan pertanyaan berulang	- Akan ada kemungkinan beberapa pemohon informasi menanyakan hal yang sama sehingga terjadi penumpukan permohonan informasi	Tidak
51	Keputusan mediasi dalam sengketa Informasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat dimungkinkan adanya mediasi lain diluar forum yang telah disediakan berkaca pada proses mediasi yang telah berjalan	- Publik tidak dapat mengakses hasil mediasi tersebut	Tidak

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (untuk disebutkan)
			Jika Dibuka	Jika Ditutup	
52	Keputusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Publik dapat mengakses dokumen tersebut	- Publik tidak memiliki hak dan peran yang signifikan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut	Tidak

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 3 Februari 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PT PP (Persero) Tbk



Joko Raharjo
Atasan PPID PT PP (Persero) Tbk